

**AKUNTABILITAS ANGGARAN PADA PROGRAM  
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN  
JEMBATAN DI DINAS PU BINA MARGA DAN TATA  
RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat S-1 Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**HAYATUN ISTIQOMAH  
NIM. 07011381621143**

**Konsentrasi Keuangan Negara Moneter dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"AKUNTABILITAS ANGGARAN PADA PROGRAM  
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI  
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018"**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

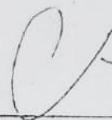
**HAYATUN ISTIQOMAH  
NIM. 07011381621143**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS.,MM  
NIP.195811191985031003



1/8 2022

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP.197705122003121003



22/7

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr.M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
196911101994011001



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayatun Istiqomah  
NIM : 07011381621143  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 1996  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Anggaran pada Program  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  
di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera  
Selatan Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 9 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Hayatun Istiqomah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Tidak penting seberapa lambat Anda melaju, selagi Anda tidak berhenti”.**

*(Confucius)*

Atas Rahmat Allah SWT,  
Skripsi ini kupersembahkan  
kepada :  
1.Kedua Orang Tuaku  
2.Saudara ku  
3.Sahabat-sahabat ku  
4.Dosen dan Pegawai FISIP  
UNSRI

## **ABSTRACT**

*This research is Budget Accountablility in the Road and Bridge Rehabilitation/Maintenance program at the Public Work Agency of Bina Marga and Spatial Planning in South Sumatera Province in 2018. This research is based on the unrealizaton of budget absorption in the read and bridge rehabilitation/maintenance program with the aim of determaining the causes of the non-realization of the budget in the in the road and bridge rehabilitation/maintenance program at the Public Work Agency of Bina Marga and Spatial Planning in South Sumatera Province in 2018. To find out the problem, this study uses a theory of financial accountability which has 4 principles is accarucy, transparency, punctuality and relevance. Qualitative methode were used in this study, based on the results of interviews and documentation. The results of this study look that in budget management in the road and bridge rehabilitation/maintenance program at the Public Work Agency of Bina Marga and Spatial Planning in South Sumatera Province has not been able to realized property due to budget efficiency in the central government which causes budget adsorption not to be absorbed properly. This research reccomends for Public Work Agency of Bina Marga and Spatial Planning in South Sumatera Province to apply good work planning, manage time and transparency in budget management.*

***Keywords : Accountabilit,y Budget Management, Road and Bridge Rehabilitation/Maintenance program at the Public Work Agency Bina Marga and Spatial Planning***

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Anggaran pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Penelitian ini didasari dari tidak teralisasinya penyerapan anggaran belanja pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak teralisasinya anggaran belanja pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Untuk mengetahui permasalahan, penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas finansial yang mempunyai 4 prinsip yaitu keakuratan, transparansi, ketepatan waktu dan relevan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pada program anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan belum dapat teralisasi dengan baik dikarenakan efisiensi anggaran pada pemerintah pusat yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak terserap dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan untuk Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan agar menerapkan perencanaan kerja yang baik, tepat waktu dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Akuntabilita Anggaran pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018”.

Tujuan penulisan skripsi ini demi memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, tidak sedikit pula kesulitan yang saya hadapi ketika saya melaksanakan pengerjaan skripsi ini, tetapi sangat terbantu karena adanya pengarahan yang sangat berharga dari beberapa pihak, dengan segala ketulusan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan serta kelancaran selama pembuatan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya, yang memberikan semangat dan doa serta dukungan kepada saya.
3. Keluarga Besar, yang telah memberikan dukungnan sepenuhnya.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Alfitri, M.Si Selaku Dekan FISIP Unsri.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA Selaku FISIP Unsri Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna selama menyelesaikan skripsi ini.

7. Pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam pengambilan data.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu selama ini.
9. Rekan-rekan satu angkatan Ilmu administrasi Publik angkatan 2016.
10. Aisyah Noviasari, Tri Indah Yuliani, Nurbaiti sebagai sahabat yang selalu membantu dan selalu memberikan semangat positif.
11. Seluruh staf Ilmu Administrasi Publik dan Admin Ilmu Administrasi Publik.

Semoga semua bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu, teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan dapat bermanfaat bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>2</b>
A. Landasan Teori.....	2
1) Pengertian Anggaran.....	2
2) Fungsi Anggaran Publik.....	3
3) Pengertian Akuntabilitas .....	3
4) Asas-Asas Akuntabilitas .....	6
5) Jenis-Jenis Akuntabilitas .....	7
6) Indikator Akuntabilitas.....	7
7) Belanja Daerah .....	9
8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .....	11
B. Kerangka Teori.....	11
<b>BAB III.....</b>	<b>16</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian .....	16

B.	Definisi Konsep.....	17
C.	Fokus Penelitian.....	18
D.	Jenis Data.....	19
E.	Sumber Data.....	20
F.	Penentuan Informan.....	20
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
H.	Teknik Keabsahan Data.....	21
I.	Tehnik Analisis Data.....	22
J.	Sistematis Penulisan.....	23
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>24</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>24</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
1)	Sejarah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	24
2)	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	26
3)	Letak Geografis Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	30
4)	Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	30
5)	Sumber Daya Manusia.....	40
B.	Analisis dan Pembahasan.....	44
1)	Keakuratan.....	44
2)	Transparansi.....	47
3)	Ketepatan Waktu.....	53
4)	Relevan.....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

1.1.	Laporan Anggaran pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2018.....	3
3.1	Fokus Penelitian.....	23
4.1	Jumlah Pegawai Sesuai Golongan Kerja.....	43
4.2	Jumlah Pegawai Sesuai Unit Kerja.....	43
4.3	Jumlah Pegawai Sesuai Jenis Kelamin.....	44
4.4	Jumlah Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan.....	44
4.5	Nama-Nama Pejabat di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.....	45
4.6	Daftar Jumlah Jembatan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan.....	61
4.7	Daftar Jumlah Panjang Jalan pada Program Program Rehabilitasi/Pemeliharaan...	61
4.8	Laporan Anggaran pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2018.....	63

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Skema Kerangka Teori Akuntabilitas Anggaran Belanja pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018.....	19
4.1	Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	42
4.2	Struktur Organisasi Bagian Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	46
4.3	.Anggaran.....	50
4.4	Data Ruas Jalan Provinsi Sumatera Selatan.....	53
4.5	Peta Ruas Jalan Provinsi Sumatera Selatan.....	54
4.6	Rapat Perencanaan dalam Penyusunan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2 Dokumentasi Jalan dan Jembatan.....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan pada Pasal 1 Nomor 12 Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pada Pasal 1 Nomor 16 Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41/PRT/M/2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan pada Pasal 1 Nomor 11 Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil/ sederhana yang terjadi pada struktur jembatan atau terowongan jalan agar didapat kondisi yang mantap sesuai dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada Pasal 1 Nomor 13 Rehabilitasi jembatan dan terowongan jalan adalah tindakan memperbaiki yang mengalami penurunan kondisi jembatan dan terowongan jalan (kekakuan, kekuatan, kestabilan tanah/struktur, ketahanan umur) agar kondisi jembatan dan terowongan jalan menjadi lebih baik.

Provinsi Sumatera Selatan tepatnya terdapat beberapa laporan ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan terdapat di beberapa lokasi di Kota Palembang,

setelah dilakukan pengecekan data dan survei di Kota Palembang ruas jalan dan jembatan yang memiliki kerusakan terdapat di 3 titik terparah yaitu Jalan Gandus, Jalan Mayor Zein dan Jalan H. M Noerdin Panji.

### 1.1 Contoh Kerusakan Jalan



*Sumber hasil dokumentasi kerusakan jalan dan jembatan di dinas pu marga dan tata ruang*

Dari gambar tersebut dapat dilihat kerusakan jalan yang terjadi karena tidak terealisasi pembangunan yang baik. Keuangan Negara terdapat penegasan dalam bidang akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yaitu suatu konsep etika dimana administrasi publik pemerintahan atau lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang sering digunakan dengan konsep-konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan dalam memberikan jawaban yang dapat dipermasalahkan dan ketidakbebasan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan diterapkan disalah satu dari aspek administrasi publik atau pemerintahan.

Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran publik haruslah dibuat secara optimal dan efektif agar dapat mengetahui konsep keberhasilan dan kegagalan dalam tugas

serta fungsi untuk mencapai target atau tujuan. Anggaran pendapatan belanja suatu daerah adalah rencana keuangan setiap tahun suatu pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pemda) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disahkan dengan peraturan daerah (Perda). Anggaran keuangan setiap tahun suatu pemerintahan daerah dalam APBD terdapat hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemda yang dievaluasi dalam segala bentuk termasuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka terlaksananya pembangunan infrastruktur pada program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan yang seharusnya sudah dimuat dalam pembahasan anggaran belanja daerah agar dapat dibiayai dan dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat terarah dan terkontrol tanpa adanya hambatan yang dapat memperlambat pembangunan.

Menurut Perpres (Peraturan Presiden) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja suatu Instansi Pemerintah Pasal 1 Nomor 14 yaitu akuntabilitas kinerja adalah wujud dari kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang diberikan para pejabat dengan tujuan tercapainya misi suatu organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah disepakati melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala dalam waktu tertentu.

Akuntabilitas memiliki tiga tujuan, yaitu pertanggungjawaban, majerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan suatu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan dalam satu periode. Akuntabilitas memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.



Kebijakan Anggaran yang mengacu pada rancangan kerja pembangunan termasuk dari rencana operasi perancangan keuangan dan pembagian sumber daya yang mana acuan kebijaksanaan finansial adalah pendekatan atau strategi dalam penyusunan rencana indikasi rancangan pada pengendalian pendapatan dan belanja suatu daerah secara efektif dan tepat. Dalam terwujudnya otonomi daerah dengan desentralisasi yang *massive*, jelas, dan bertanggungjawab maka pengelolaan keuangan suatu daerah haruslah cermat, tepat, efektif, terbuka, dan terperinci. Pemerintahan daerah wajib mengoptimalkan anggaran dengan baik dalam rangka pertanggungjawaban publik.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaannya yaitu kewajiban pemerintah sebagai pengguna anggaran untuk dapat membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang nantinya akan dievaluasi dan diklarifikasi. Dimana pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi acuan agar suatu program atau kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam akuntabilitas perhitungan belanja pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan adanya proses realisasi yang tidak sesuai target dan akuntabilitas yang belum tercapai.

### 1. Realisasi Anggaran yang Tidak sesuai dengan Target

**Tabel 1.1 Laporan Anggaran Pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pada Tahun 2018**

Uraian	Total	Realisasi	%
<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Rp177.253.515.531</b>	<b>Rp132.940.136.648</b>	<b>75,00%</b>
Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp10.257.200.000	Rp10.257.200.000	100%
Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Oki-SP. Kepuh	Rp15.000.000.000	Rp12.547.876.999	83,65%
Pemeliharaan Berkala Jalan Kurungan NyawaMartapura	Rp4.000.000.000	Rp1.798.000.000	44,95%
Pemeliharaan Berkala Jalan Martapura-SP. Martapura	Rp4.000.000.000	Rp3.999.000.000	99,97%
Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Haji-SP. Campang	Rp11.800.000.000	Rp6.866.702.666	58,19%
Pemeliharaan Berkala Jalan Gandus-Batas Kabupaten Banyuasin	Rp4.000.000.000	Rp3.755.680.000	93,89%
Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Zein	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	100%
Pemeliharaan Berkala Jalan H. M Noerdin Panji	Rp3.900.000.000	Rp3.872.026.000	99,28%
Pemeliharaan Berkala Jalan Nuh Macan (Kayuagung)	Rp1.000.000.000	Rp800.000.000	80%

Sambungan tabel 1.1 Laporan Anggaran Pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pada Tahun 2018

Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Penyandingan -Batas Kabupaten Okut	Rp13.472.000.000	Rp13.296.988.000	98,7%
Pemeliharaan Berkala Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya	Rp6.600.000.000	Rp5.500.000.000	83,33%
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Muba-SP. Air Itam	Rp5.800.000.000	Rp3.521.900.000	60,72%
Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Belimbing-Pendopo (Pali)	Rp3.000.000.000	Rp1.773.567.994	59,11%
Pemeliharaan Berkala Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya	Rp4.000.000.000	Rp2.330.000.000	58,25%
Pemeliharaan Berkala Jalan Pagar Alam-Tanjung Raya	Rp10.000.000.000	Rp3.405.624.225	34,06%
Pemeliharaan Berkala Jalan Talang Padang-Padang	Rp8.200.000.000	Rp6.200.000.000	75,61%
Pemeliharaan Berkala Jalan Plaju-Batas Kabupaten Oki	Rp5.000.000.000	Rp2.376.989.544	47,54%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Oku	Rp3.894.100.000	Rp2.700.000.000	69,36%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Okut	Rp5.887.477.846	Rp4.900.000.000	88,23%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Okus	Rp6.070.735.423	Rp5.620.187.000	92,58%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Palembang	Rp1.849.645.000	Rp1.849.645.000	100%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Oki	Rp2.941.398.708	Rp 923.008.271	31,38%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Ogan Ilir	Rp4.324.418.769	Rp1.901.777.333	43,98%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Muara Enim	Rp6.469.816.769	Rp1.280.302.000	19,79%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Pali dan Prabumulih	Rp3.573.500.000	Rp823.119.000	23,03%
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Lahat	Rp3.672.680.400	Rp2.100.000.000	57,18%
Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Perlengkapan Jalan Wilayah I Sumsel	Rp6.635.135.654	Rp6.635.135.654	100%
Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Perlengkapan Jalan Wilayah II Sumsel	Rp7.000.000.000	Rp7.000.000.000	100%
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000	100%
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel	Rp7.405.406.962	Rp7.405.406.962	100%

**Sumber : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan**

Pada tabel 1.1 di atas, dalam program rehabilitasi/peliharaan jalan dan jembatan Pada tabel 1.1 di atas, dalam program rehabilitasi/peliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target realisasi anggaran antara lain pemeliharaan berkala jalan batas oki – sp. kepuh yang hanya dapat menyerap anggaran 83,65%, pemeliharaan berkala jalan kurungan nyawa sampai martapura yang hanya dapat menyerap anggaran 44,95%, pemeliharaan berkala jalan sp. haji sampai sp. campang yang hanya dapat menyerap 58,19%, pemeliharaan berkala jalan nuh macan (kayuagung) yang hanya dapat menyerap 80%, pemeliharaan berkala jalan akses menuju kebun raya sriwijaya yang hanya dapat menyerap 83,33%, pemeliharaan berkala jalan kabupaten muba sampai sp. air hitam yang hanya dapat menyerap 60,72%, pemeliharaan bekala jalan sp. belimbing pendopo (pali) yang hanya dapat menyerap 59,11%, pemeliharaan berkala jalan tebing tinggi sampai tanjung raya yang hanya dapat menyerap 58,25%, pemeliharaan berkala

jalan pagar alam sampai tanjung raya yang hanya dapat menyerap 34,06%, pemeliharaan berkala jalan talang padang sampai padang yang hanya dapat menyerap 75,61%, pemeliharaan berkala jalan plaju sampai batas kabupaten oki yang hanya dapat menyerap 47,54%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten oku yang hanya dapat menyerap 69,36%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten oki yang hanya dapat menyerap 31,38%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten OI yang hanya dapat menyerap 43,98%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten muara enim yang hanya dapat menyerap 19,79%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten pali dan prabumulih yang hanya dapat menyerap 23,03%, pemeliharaan rutin jalan kabupaten lahat yang hanya dapat menyerap 57,18%. Terdapat tujuh belas kegiatan pada anggaran program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatann hingga menyebabkan anggaran tersebut hanya terserap sebesar 75%. Penyebab tidak dapat terserapnya anggaran dikarenakan efesiensi anggaran pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kebijakan defisit anggaran diambil oleh pemerintah mengakibatkan anggaran yang direncanakan tidak terserap sepenuhnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Tata Cara Pemberian Sanki atas Pelaksanaan Anggaran Belanja, pada pasal 3 ayat 2 buruf b yang menyatakan bahwa persentase realisasi pencapaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen). Berdasarkan data yang ada di laporan pengawasan definitif per kegiatan dalam program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan proses yang dilakukan tidak mencapai target, realisasinya hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Berdasarkan Keputusan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang kualifikasi pertimbangan dan kerja dengan nilai persentase berkisar 60-80% berarti kurang efektif.

## **2. Akuntabilitas yang Belum Tercapai**

Pada permasalahan kedua tentang akuntabilitas yang belum tercapai pada anggaran program rehabilitasi atau perawatan suatu jalan dan jembatan untuk tahun 2018 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga mengambil kendali dalam proses pertanggungjawaban anggaran setiap program yang telah direncanakan.

Realisasi anggaran program tidak terlaksana dengan baik sesuai pertanggungjawaban anggaran yang diberikan, dimana seharusnya realisasi anggaran mencapai 95% namun pada realitanya realisasi anggaran pada tahun 2018 hanya mencapai 75%. Terhambatnya realisasi anggaran dapat terjadi akibat tidak adanya rencana antisipasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang jika terjadinya defisit anggaran yang telah direncanakan, dan kurangnya pengawasan dalam setiap program atau kegiatan yang dijalankan, maka terjadi kendala pencairan dana. Dengan ada laporan pertanggungjawaban dapat memberikan saran dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan rancangan anggaran untuk tahun berikutnya.

### **B. Perumusan Masalah**

Latar belakang masalah di atas dapat diuraikan menjadi suatu rumusan masalah-masalah, sebagai berikut :

Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas anggaran belanja pada rencana rehabilitasi atau perawatan suatu jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas anggaran belanja pada rencana rehabilitasi atau perawatan suatu jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pada ilmu pengetahuan dan akademis administrasi publik agar dapat memberikan referensi mengenai ilmu keuangan khususnya akuntabilitas anggaran belanja daerah, serta memberi acuan untuk meneliti akuntabilitas anggaran belanja daerah.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis akuntabilitas anggaran dalam mengatasi realiasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi anggaran pada rencana rehabilitasi atau perawatan suatu jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan bagian Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Bernadin Dan Russel. 2010. *MSDM Ditermahkan Oleh Bambang Sukoco*. Bandung: PT. Armico.AA

Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta : Penerbit Taushia

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Cv

**DOKUMEN:**

Buku Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan  
Laporan Pengawasan Definitif Anggaran per Kegiatan Tahun Data Jalan dan Jembatan Per  
UPTD

**INTERNET:**

Jodi Gohora, dkk. Akutabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara

(Diakses melalui google pada 25 JUNI 2021)

Mailinda Eka Tuniza.2009. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Daerah (Studi Kasus D.I. Yogyakarta)

(Diakses melalui google pada 10 Agustus 2021)

**PERATURAN:**

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 Tentangm Kriteria  
Penilaiandan Kinerja Keuangan.

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintahan.

Peraturan Meteri Keuangan 215/PKM.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 258/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Tata Cara Pemberian Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953 Landasan Kerja Department Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Selatan Undang-Undang No.15 Tahun 1980 (PP No.24 tahun 1987) menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan dan Jembatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah